

DAFTAR ISI

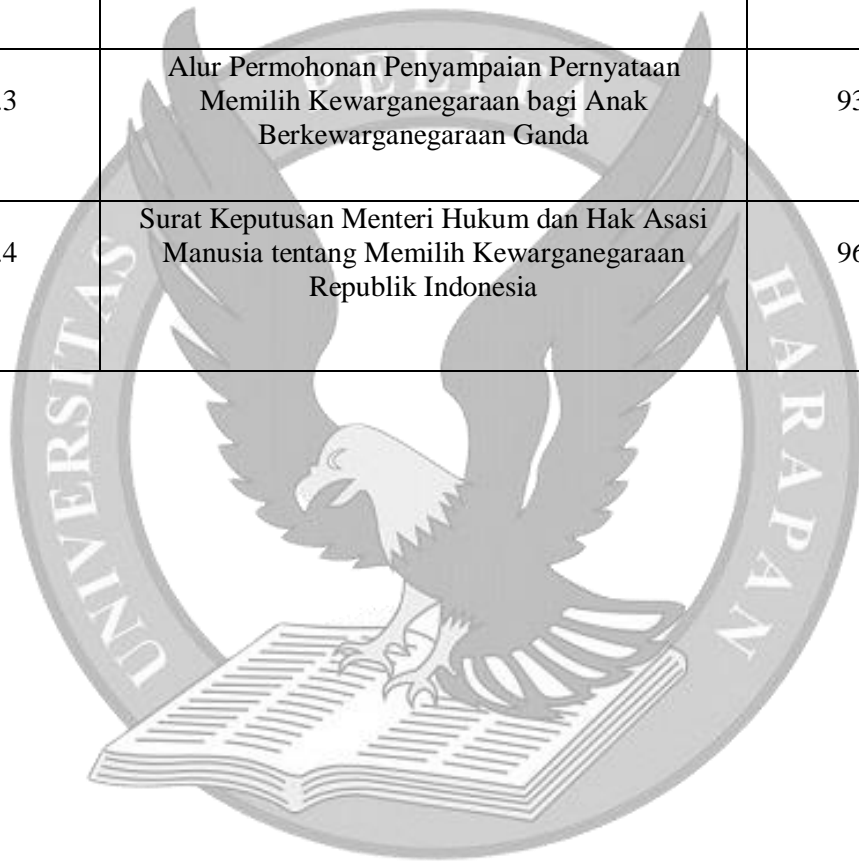
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.4.1 Manfaat Teoritis	17
1.4.2 Manfaat Praktis	17
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	21
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	23
2.2 Landasan Konseptual	28
2.2.1 Pengertian Anak	28
2.2.1.1 Hak Anak	31
2.2.1.2 Kewajiban Anak	34
2.2.2 Perkawinan	35
2.2.2.1 Definisi Perkawinan	35
2.2.2.2 Syarat Sah Perkawinan	36
2.2.2.3 Prinsip Perkawinan	38
2.2.2.4 Perkawinan Campuran	39
2.2.2.5 Anak Hasil Perkawinan Campuran	42
2.2.3 Warga Negara	45
2.2.4 Kewarganegaraan	48
2.2.4.1 Sejarah Hukum Kewarganegaraan di Indonesia	48
2.2.4.2 Asas Kewarganegaraan	53
2.2.4.3 Kewarganegaraan Ganda	57
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	62
3.1 Pengertian, Objek dan Lingkup Penelitian	62
3.1.1 Pengertian	62
3.1.2 Objek	64
3.1.3 Lingkup Penelitian	64
3.2 Jenis Penelitian	65
3.2.1 Penelitian Hukum Normatif	65
3.2.2 Penelitian Hukum Empiris	66
3.2.3 Penelitian Hukum Normatif Empiris	67
3.3 Pendekatan Penelitian	68
3.4 Bahan Hukum	70
3.5 Teknik Pengumpulan Data	72

BAB IV:	PEMBAHASAN DAN ANALISA	74
4.1	Peraturan Hukum Kewarganegaraan bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran	74
4.2	Peran Negara dalam Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran	98
BAB V:	KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1	Kesimpulan	113
5.2	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		117



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
4.1	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (SK Pasal 41)	88
4.2	Affidavit atau Salah Satu Jenis Fasilitas Keimigrasian terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda	90
4.3	Alur Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	93
4.4	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia	96



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
4.1	Jenis dan Tarif Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Pewarganegaraan terhadap Subjek RPP tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	

